

Radikalisme dan Tantangan Keberagamaan Indonesia di Era Reformasi

¹ Luqman Al Hakim, ²Muhorib Alhilali, ³Galih Prasetio, ⁴Ahmad
Shofiyulloh Fahmi

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Hos Cokroaminoto Blok E Nimbokang Jayapura Papua
E-mail: luqmanibnusuud@gmail.com

Abstract

Radicalism constitutes a global phenomenon manifesting in numerous countries, with Indonesia serving as a notable example. In the reform era, the advent of a free press gave voice to a plethora of Islamic community groups, including those of a radical disposition. This paper aims to provide a comprehensive review of the form and implementation of radicalism in post-New Order Indonesia, with a focus on its impact on social and religious behavior. The research method employed is descriptive research-based qualitative research, utilizing a social science approach through the lens of social construction theory, in conjunction with religious values. The results indicate that the proliferation of radicalism is attributable to a deficiency in comprehension of the principles of the five principles of the Indonesian constitution (Pancasila) and the concept of religious diversity, leading to assertions of truth and exclusivism in religion (rigidity in thinking and religion). Consequently, the concept of renewal (ijtihad) emerges as a necessity, necessitating the interpretation of religious and social contexts to adjust Indonesian culture, thereby ensuring the preservation of its legacy of moderation in religion.

Keywords: Radicalism, Religious Moderation, Diversity

Abstrak

Radikalisme merupakan fenomena global yang terjadi di sejumlah negara, dan kemunculan radikalisme ditandai berbagai sebab tidak terkecuali di Indonesia. Pada era reformasi kebebasan pers dibuka, mengakibatkan banyak kelompok masyarakat islam yang mengemukakan pemikirannya seperti kaum radikal. Tulisan ini akan mengulas terhadap bentuk dan implementasi radikalisme di Indonesia pasca orde baru dan tantangannya terhadap perilaku sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis deskriptif research, menggunakan pendekatan ilmu sosial melalui teori konstruksi sosial yang dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjamurnya radikalisme salah satunya disebabkan kurangnya memahami Pancasila, dan konsep perbedaan dalam agama sehingga memunculkan *truth claim* dan eksklusivisme dalam beragama (kekakuan dalam berpikir dan beragama). Oleh karenanya, dibutuhkan konsep pembaharuan (*ijtihad*) dengan menafsirkan konteks agama dan sosial yang menyesuaikan budaya Indonesia sebagai warisan *khazanah* moderasi dalam beragama.

Kata Kunci: Radikalisme, Moderasi Agama, Keberagamaan.

Pendahuluan

Agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, supaya kehidupan mereka di dunia menjadi makmur, dan mereka akan selamat di akhirat nanti. Doktrin-doktrin agama tersebut bersifat ideal dan mengharapkan para pengikutnya menerapkan doktrin tersebut dalam bentuk yang terbaik. Namun kadang-kadang penerapannya jauh dari bentuk ideal yang diinginkan oleh agama itu. Seringkali agama menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang memiliki dua wajah, dalam arti bahwa wujud dari penerapan ajaran suatu agama sangat berbeda dari ajaran yang sebenarnya diharapkan oleh agama itu sendiri. Semua agama menyerukan perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Namun dalam praktiknya, agama sering tampil sebagai kekuatan yang menakutkan, garang, penyebar konflik, bahkan terkadang sampai menyebabkan peperangan.¹

Islam adalah agama dakwah dari zaman Nabi Muhammad saw hingga sekarang. Ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin* adalah hal yang pokok. Salah satu aspek dari ajaran tersebut adalah bagaimana Islam hadir untuk menghormati satu sama lain, baik kepada penganut agama yang serupa maupun kepada penganut agama yang berbeda. Islam berkembang semakin luas, seiring dengan perjalanannya pemahaman tentang Islam pun juga semakin luas. Pemahaman Islam melahirkan banyak golongan di dalam tubuh kaum muslim.

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Meskipun begitu, Indonesia bukanlah negara yang menerapkan teokrasi dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan konstitusinya, karena selain umat Islam yang merupakan kelompok terbesar, ada juga pemeluk agama lain yang berhak atas negeri ini. Indonesia juga tidak bisa disebut sebagai negara sekuler, karena agama dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila yang berakar dari Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Reformasi yang diluncurkan pada tahun 1998 bukan akhir dari perjuangan untuk membenahi bangsa Indonesia. Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda, dan pasca reformasi kebebasan terbuka bagi individu dalam mengemukakan aspirasinya. Terwujudnya harmoni dan toleransi akan

¹ Johan Efendi, "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan", 05 (Jakarta: LP3ES, 1978), hlm.13.

² Soeharto, *Agama dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Biru, 1981), hlm. 346.

mampu mengelola kehidupan baik bersifat fisik dan mental. Munculnya radikalisme turut menghadirkan disintegrasi, sebagaimana yang telah terjadi.³

Radikalisme dan deradikalisasi⁴ merupakan istilah yang berkaitan dengan terorisme. Menurut Callen, ada tiga karakteristik radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan tanggapan terhadap situasi yang sedang terjadi. Kedua, radikalisme tidak hanya terbatas pada penolakan, melainkan juga berusaha untuk terus menggantikan sistem yang ada dengan sistem yang baru. Ketiga, keyakinan yang kuat dari kaum radikal terhadap kebenaran program atau ideologi yang mereka miliki.⁵ Dalam ranah politik, menurut Baradat, radikalisme merujuk pada pemahaman individu atau kelompok yang secara drastis tidak puas dengan keadaan masyarakat yang ada dan tidak sabar menunggu perubahan yang bersifat fundamental.⁶

Adapun tindakan radikalisme pasca Reformasi, seperti konflik Poso, teror bom di rumah ibadah, teror bom di Kejaksaan Agung Jakarta, peledakan bom di Bursa Efek Jakarta, dan lain-lain memberikan dampak secara global dalam keberagaman di Indonesia. Abdurrahman Mas'ud, guru besar dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam dan Pemimpin Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, mengungkapkan bahwa gerakan radikalisasi agama dalam beberapa aspek dapat mengganggu stabilitas nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷

Berdasarkan uraian di atas, pemaparan tersebut banyak menjelaskan radikalisme dan tantangan keberagaman secara umum di Indonesia di era reformasi. Artinya dibutuhkanlah implementasi Islam *wasathiyah* yang berkemajuan dalam konteks berbudaya Indonesia. Berangkat dari titik tersebut penulis melihat terdapat celah yang belum terpecahkan yakni implementasi dalam ranah pluralitas dan keagamaan di Indonesia. Penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam, bagaimana radikalisme tersebut ditinjau dalam perspektif pluralitas keagamaan dalam kajian sosial keagamaan. Penelitian ini tentu bukan merupakan penelitian satu-satunya yang membahas tentang radikalisme yang ada di Indonesia. Beberapa karya terdahulu yang membahas tema radikalisme tentu sudah banyak. Baik berupa buku ataupun karya tulis di dalam jurnal ilmiah. Seperti karya-karya

³ A. Faiz Yunus, "Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 13, no. 1 (January 1, 2017): hlm. 80, <https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>.

⁴ Deradikalisasi merupakan upaya penanggulangan masyarakat dari aksi radikalisme. Deradikalisasi di Indonesia tidak hanya dilakukan BNPT akan tetapi juga dilakukan 4 ormas besar Islam, yakni; NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Persis.

⁵ Ketiga indikator radikalisme yang dikemukakan Callen dapat dijadikan pemetaan dalam mengidentifikasi sebuah pemikiran atau gerakan yang bersifat radikal.

⁶ Saefuddin Zuhri, *Deardikalisasi Terorisme Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 28.

⁷ Ditjen Bimas, *Radikalisme Tantangan Keagamaan* (Jakarta: Ditjen Bimas, 2014), hlm. 1.

berikut ini “Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat ‘Kekerasan’ dalam Al-Qur’an” oleh Junaidi Abdillah. “Argumen Al-Qur’an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme” oleh Abu Bakar. “Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas” oleh Ahmad Asrori. “Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur’an Terhadap Sikap Keberagamaan” oleh Muhsin Mahfudz. Dari penelitian-penelitian yang sudah ada maka secara kajian pustaka penelitian ini adalah sebagai pelengkap dan pendukung dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap lebih tepat karena, karakteristik kajian dalam tulisan ini adalah deskriptif research dengan menjelaskan fenomena-fenomena global yang terjadi dalam dimensi agama dan kemanusiaan, khususnya di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data sekunder merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder didefinisikan sebagai sumber data yang diperoleh melalui berbagai media baik berupa study literature e-library, buku, dokumen, dan berbagai sumber data sekunder lainnya yang dapat diperoleh dengan membaca, mempelajari, serta memahami sumber data tersebut (Sugiyono, 2012).⁸ Dengan menggunakan metode ini, penelitian tidak harus dilakukan secara langsung ke lapangan, namun dapat diperoleh dari berbagai jurnal, buku online, berita, serta berbagai referensi kajian ilmiah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi sumber data yang diperoleh.

Melalui tahapan analisis dan interpretasi data-data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya akan diperoleh simpulan-simpulan yang dapat menjadi studi pembandingan, sehingga dapat dimunculkan sebuah kesimpulan akhir berdasarkan data yang telah melalui beberapa tahap analisis dan pengkajian yang mendalam. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa *narrative review*. Pada teknik *narrative review*, peneliti bertugas untuk mengamati, melakukan penilaian, dan menginterpretasikan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaannya, teknik *narrative review* pada dasarnya bukan hanya berupa pengumpulan data kemudian menyusunnya, melainkan lebih kompleks yang meliputi proses analisis secara mendalam, dan membutuhkan kemampuan interpretasi data yang didapatkan. Sebab data tersebut nantinya

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Cengkareng: ALFABETA, 2012), hlm. 34.

akan menjadi rujukan utama dalam penarikan kesimpulan dari hasil kajian pustaka yang dilakukan.⁹

Metode penelitian dibantu dengan adanya pendekatan dalam ilmu sosial dan diperkuat melalui teori konstruksi sosial yang berfokus pada perbuatan seorang individu. Sejalan dengan teori interaksionisme oleh Blummer yang melibatkan arti; 1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan arti yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. 2. Arti tersebut diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain. 3. Arti tersebut disempurnakan selama proses interaksi sosial berlangsung.¹⁰ Sumber data yang diperoleh dalam tulisan ini, berasal dari buku-buku yang membahas radikalisme dan terorisme, harmoni dan kerukunan umat beragama, jurnal-jurnal yang membahas tema yang serupa, buku yang ditulis Imam Samudra guna menjelaskan lebih lanjut pemaknaan radikalisme, dan laporan BNPT yang tertuang dalam majalah pusat media damai 2019-2024.

Hasil dan Diskusi

Narasi Eksklusivisme dalam Beragama

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Eksklusivisme terdiri atas dua kata, yaitu terpisah dari yang lainnya, khusus, dan “isme” yang berarti paham. Eksklusivisme berasal dari kata eksklusif yang arti sesungguhnya adalah terpisah dari yang lainnya atau juga dapat dimaknai sebagai paham yang cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat. Dalam buku dialog kritik dan Identitas Agama yang ditulis oleh Th. Sumartana, yang mengutip Zamakhsari berpendapat bahwa eksklusivisme adalah sikap menutup diri dari pengaruh agama lain, ingin mempertahankan serta memurnikan identitasnya. Th Kobong menyatakan bahwa eksklusivisme adalah sikap arogan terhadap agama lain,¹¹ sikap yang membatasi kasih Allah yang tidak terbatas menjadikan Allah terkurung dalam sistem nilai-nilai yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

Pembahasan mengenai pluralitas, eksklusivisme merujuk pada sebuah konsep keragaman yang menekankan pengakuan kebenaran satu agama tertentu. Konsep ini beranggapan bahwa agama yang dipilih adalah yang paling benar, sedangkan agama lainnya dianggap tidak valid.¹² Nurcholis Majid

⁹ Ibid.

¹⁰ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Society* 4, no. 1 (June 1, 2016): hlm. 17, <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.

¹¹ Ahmad Zamakhsari, “Teologi Agama-Agama Tipologi Tripolar; Eksklusivisme, Inklusivisme Dan Kajian Pluralisme,” *Tsaqofah* 18, no. 1 (June 28, 2020): hlm. 39, <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v18i1.3180>.

¹² Abu Bakar, “Argumen Al-Qur’an Tetang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme,” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 1 (January 9, 2017): hlm. 46, <https://doi.org/10.24014/trs.v8i1.2470>.

menjelaskan bahwa eksklusivisme merupakan sebuah paradigma dalam memandang agama-agama lain sebagai jalan yang salah dan menyesatkan pengikutnya.¹³ Setidaknya terdapat dua pandangan mendasar yang menjadi ciri sekaligus melandasi eksklusivisme dalam beragama. Pertama adalah *truth claim* (klaim kebenaran), dan kedua adalah *salvation claim* (klaim keselamatan).

Secara filosofis, sudut pandang tentang kebenaran sangat bergantung pada penafsiran terhadap kebenaran itu sendiri. Dalam tradisi agama, kitab suci memiliki posisi sacral sebagai dokumen suci dijadikan standar legalitas akan kebenaran, sehingga dalam rangka mempertahankan klaim kebenaran, terkadang dilandaskan kepada kitab suci untuk memberikan justifikasi terhadap hal-hal yang bersebrangan dengan kebenaran versi kitab suci tersebut. Aktivitas penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang dilakukan secara tekstual-normatif lebih cenderung melahirkan faham eksklusif terhadap suatu agama, sedangkan penafsiran yang dilakukan secara kontekstual-substansialis cenderung melahirkan inklusif-pluralis. Melalui penafsiran tentang teks keagamaan inilah wajah agama akan diperlihatkan kepada publik sebagai nilai kebenaran hasil produksi penafsiran.¹⁴

Menurut Cecelia Lynch, ada lima kategori dalam beragama seseorang; eksklusif, inklusif, pluralis, apologetik, dan sinkretik. Sikap apologetik adalah sikap yang mempertahankan doktrin saat menghadapi tantangan dari luar atau dari dalam. Sikap sinkretis mengakui adanya berbagai tradisi keagamaan yang sudah ada baik dalam masyarakat multikultural maupun dalam diri individu. Sikap sinkretis ini dapat menjangkau lebih jauh untuk mengkompromikan identitas iman dan agama tertentu serta mampu menafsirkan iman yang hidup tidak dalam kerangka atau sistem iman itu sendiri.¹⁵

Secara garis besar terdapat dua golongan dalam memahami agama, yakni. 1. Golongan yang ingin menyeragamkan prinsip agama mereka secara universal (eksklusif),¹⁶ dan 2. Golongan yang menerima perbedaan dan

¹³ Rofiq Nurhadi et al., "Dialektika Inklusivisme dan Eksklusivisme Islam Kajian Semantik Terhadap Tafsir Al-Quran Tentang Hubungan Antaragama | Nurhadi | Jurnal Kawistara" 03, no. 01 (2013): hlm. 33.

¹⁴ Muhsin Mahfudz, "Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an Terhadap Sikap Keberagamaan" 4, no. 2 (December 14, 2016): hlm. 122-148., <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/2768>.

¹⁵ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 73.

¹⁶ Sikap eksklusivisme merupakan sikap tertutup yang mendorong penganutnya untuk tertutup dengan kalangan dari luar mereka, sikap tersebut umumnya digunakan oleh kelompok pertama. Adapun sebabnya yakni, orang di luar agama mereka tidak sesuai dan harus disesuaikan.

berusaha bersikap terbuka (inklusif). Sedangkan kelompok inklusif,¹⁷ umumnya menggunakan konsep yang berlawanan terhadap eksklusivisme, kelompok inklusif lebih cenderung mendorong penganutnya untuk terbuka dan lebih memberikan harmoni kepada sesama masyarakat baik dalam atau di luar agama mereka.¹⁸

Munculnya krisis dalam berbagai bidang turut memberikan aksi yang menuai konflik dan menyentuh sentimen-sentimen agama di berbagai wilayah di Indonesia. Diperlukan implementasi dalam beragama baik secara lisan dan perbuatan. Iman secara lahir dan batin memberikan pengaruh positif dalam mengurangi faktor x pemicu SARA dan eksklusivitas dalam beragama. Sejatinya seseorang yang baik dalam beragama tidak akan melakukan eksklusivisme, sebaliknya seorang yang bereklusivisme tidak akan memahami esensi sejati agamanya.¹⁹

Teknologi menjadi tantangan di era ini khususnya bagi sektor agama, banyak terjadi kasus pelecehan agama melalui media sosial baik WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Hal tersebut memunculkan sikap eksklusivisme baik secara horizontal maupun vertikal. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul sikap positif dengan menyebarkan pendidikan kultural Indonesiasentris dan sosialisasi bahaya eksklusivisme beragama sehingga masyarakat awam lebih mengetahui dan mengantisipasi menyebarnya paham eksklusivisme, khususnya dalam bidang agama. SARA merupakan implementasi eksklusivisme baik dalam konsep agama, dan budaya.²⁰

Eklusivisme dalam beragama dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang lahir dari interaksi simbolik dan pemaknaan subjektif terhadap ajaran agama. Menurut teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks eksklusivisme, individu atau kelompok menciptakan makna terhadap teks keagamaan (eksternalisasi), menyebarkannya sebagai kebenaran kolektif (objektivasi), dan akhirnya individu-individu dalam masyarakat menerima dan menanamkan makna tersebut sebagai kebenaran mutlak (internalisasi).

¹⁷ Inklusifisme ialah sikap keagamaan yang memandang terdapat kebenaran di luar agama mereka meskipun tidak seutuhnya sempurna dan sebenar agama yang dianutnya.

¹⁸ Luqman Al Hakim, *Isu-Isu Islam Kontemporer (Politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial)* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), hlm. 184.

¹⁹ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Minhaj Berislam, dari Ritual Hingga Intelektual* (Jakarta: INSIST, 2020), hlm. 35.

²⁰ Anggalih Bayu Muh. Kamim, "Muslim dan Pemanfaatan Teknologi Menuju Pergerakan: Analisis Jaringan Akun Twitter @MCAOps (Muslim Cyber Army) dan Gejala Perubahan Aktivisme Islam," in *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: CIS Form, 2019), hlm. 79.

Hal ini sejalan dengan interaksionisme simbolik Blumer, yang menyatakan bahwa makna terbentuk melalui interaksi sosial dan ditafsirkan secara subjektif. Klaim kebenaran (truth claim) dan keselamatan (salvation claim) dalam eksklusivisme adalah produk dari interaksi simbolik antara pemeluk agama dengan simbol-simbol keagamaan, seperti kitab suci dan doktrin agama, yang maknanya ditafsirkan secara literal atau tekstual.

Penafsiran literal menghasilkan pemahaman yang eksklusif, sedangkan penafsiran kontekstual dapat membuka peluang ke arah inklusivisme dan pluralisme. Sikap eksklusif terbentuk melalui interaksi yang berulang dengan simbol keagamaan yang dipahami secara sempit, sehingga membentuk identitas sosial yang tertutup dan cenderung menolak keberagaman.

Pluralitas dan Tantangan Kemanusiaan

Keragaman bahasa, budaya, dan agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia memiliki nilai strategis di panggung internasional. Sebagai bangsa yang multikultural dan multietnis, hal ini merupakan sebuah risiko. Jika keragaman tersebut menjadi faktor yang memperkuat hubungan sosial antar elemen bangsa, maka dunia akan menganggap Indonesia sebagai acuan utama sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keragaman. Sebaliknya, jika Indonesia gagal dalam menjaga keragaman tersebut, maka dunia akan merasakan konsekuensinya. Hal ini didasarkan pada dua kondisi. Pertama, secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai paru-paru dunia dan terletak di garis khatulistiwa. Hutan Indonesia sangat penting bagi dunia sebagai penyedia kelestarian alam terbesar. Ketika hutan Indonesia hancur, maka dunia akan mengalami dampaknya. Kedua, secara sosiologis dan politis, Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar. Indonesia akan selalu menjadi perhatian dunia dalam melihat kehidupan umat Islamnya. Oleh karena itu, jika Indonesia tidak mampu mengelola kehidupan agama sebagai pilar kerukunan, hal ini akan berimbas pada perpolitikan Islam di dunia internasional. Stabilitas dunia Islam akan terpengaruh jika bangsa Indonesia tidak berhasil mengelola keragaman di sekitarnya.²¹

Persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dekade belakangan ini terganggu dengan berbagai persoalan di masyarakat, khususnya dilema pluralitas dan tantangan kemanusiaan. Ditambah lagi dengan segolongan yang mengatas namakan kebenaran. Syed Hashim Ali, mantan rektor Universitas Aligarh menyatakan bahwa pluralisme (kemajemukan) ialah kondisi di mana masyarakat terdiri dari beragam etnis, agama, dan budaya hidup harmonis berdampingan dalam satu negara.

²¹ Bimas, *Radikalisme Tantangan Keagamaan*, hlm. 63.

Indonesia merupakan negara plural baik dalam agama, suku, bahasa, dan budaya, oleh sebab itu era global menjadi tantangan khusus untuk mengokohkan pluralitas dan kebersamaan.²² Salah satu problem keagamaan dewasa ini ialah permasalahan agama dan budaya. Sebagian kalangan menolak apa yang dianggap bukan dari golongan mereka, sehingga memunculkan purifikasi. Dalam proses-nya purifikasi terbagi menjadi dua, ada yang menolak dengan keras, dan cenderung memberikan perlawanan.

Bentuk perlawanan itu berupa pemikiran dengan tindakan yang menyesuaikan dengan kultur setempat. Keberagamaan multikulturalis tidak hanya untuk agama itu sendiri, melainkan lebih untuk kemanusiaan. Seorang multikulturalis tidak akan mengklaim bahwa dirinya berjuang lebih untuk membela Tuhan daripada orang lain.²³ Seorang multikulturalis mengerti alasan di balik agama dan berupaya untuk melaksanakan ajaran agamanya serta menyadari bahwa dirinya adalah produk dari sejarah dan memahami keragaman yang merupakan wujud dari kebudayaan manusia. Kesadaran multikulturalis dalam berinteraksi sosial dan beragama mengurangi munculnya budaya kekerasan yang mengatasnamakan agama dalam beberapa dekade terakhir yang menjadi isu baik di tingkat nasional maupun global.²⁴

Aksi radikalisme merupakan aksi yang dilakukan teroris, aksi tersebut dilandaskan semangat ingin merubah tanpa memahami masyarakat secara global.²⁵ Salah satu tragedi kemanusiaan yang besar ialah Bom Bali. Menurut mereka perang ialah membunuh atau terbunuh. Imam Samudra menjelaskan bahwa bom Bali merupakan salah satu bentuk *ukhuwah Islamiyah*. Sebagai pengejawatahan satu jasad, jika satu sakit maka semua ikut sakit, menurutnya apa yang ada di Bali belum seberapa dengan umat Islam di Kashmir, Palestina, dan lainnya. Imam Samudra memperkuatnya berdasarkan dalil Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam ialah agama yang sempurna, tidak kurang tidak lebih. Islam berlaku sepanjang zaman, dulu dan nanti. Jihad adalah salah satu aspek dari syariat Islam yang akan terus berlanjut hingga akhir zaman.

الْجِهَادُ مَا ضَرَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Jihad akan terus berlangsung hingga hari kiamat”.

²² Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 80.

²³ Ketuhanan dan kemanusiaan memang bersifat fitrah (*primordial*), tetapi selalu berada dalam ruang dan waktu.

²⁴ Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalani Kebersamaan*, hlm. 79.

²⁵ Al Makin, *Plurality Religiosity And Patriotism Critical Insight Into Indonesia and Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2019), hlm. 112.

Operasi jihad Bom Bali dianggap sebagai jihad ofensif meskipun dalam praktiknya tidak persis sama, dan seideal dengan ofensifnya. Dalam tafsirnya Imam Samudra menilai jihad hanya sebatas berperang dengan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana nasib keluarga korban jika mereka seorang muslim lantas apakah tidak menyalahi hukum Islam yang lain.²⁶

Pasca Bom Bali gerakan radikalisme semakin masif hingga terbentuknya BNPT dapat menekan laju radikalisme. Di bawah ini merupakan serangan radikal dari tahun 2002-2011.

Tabel 1: Aksi Radikalisme Dari Bom Bali 1 Sampai BNPT Berdiri

Tahun	Peristiwa
2002	Bom Bali 1, pada 12 Oktober.
	Bom Kedutaan Filiphina di Manado, pada 12 Oktober.
	Bom Mc. Donald Makassar, pada 5 Desember.
2003	Bom Kompleks Mabes Polri di Jakarta, pada 3 Februari.
	8 kali bom meledak di Poso sejak 12 Juli.
	Bom Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, pada 27 April.
	Bom JW Marriot di Jakarta, pada 5 Agustus.
2004	Bom Palopo, pada 10 Januari.
	6 kali bom meledak di Poso sejak 18 Januari.
	Bom Kedubes Australia di Jakarta, pada 9 September.
	Bom Gereja Immanuel Palu di Sulawesi Tengah, pada 12 Desember.
2005	10 kali bom meledak di Poso sejak 1 Januari.
	3 bom meledak di Ambon, pada 21 Maret.
	Bom Tentena, pada 28 Mei.
	Bom Pamulang di Tangerang Selatan, pada 8 Juni.
	Bom Bali 2, pada 1 Oktober.
	Bom Pasar Palu di Sulawesi Tengah, pada 31 Desember.
2006	9 kali Bom meledak di Poso sejak 10 Maret.
2009	Bom Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton di Jakarta, pada 17 Juli.
2010	Perampokan Bank CIMB Niaga 18 Agustus hasil perampokan untuk pendanaan kegiatan terorisme.
	Bom di Pasar Sumber Arta Bekasi, pada 30 September.
2011	Bom di Mangga dua Ambon, pada 21 Februari.
	Bom di Puspitek Serpong Banten pada 26 Maret.

²⁶ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris* (Solo: Jazera, 2004), hlm. 161.

	4 kali teror bom buku di Jakarta dan Ciganjur, pada 15 Maret.
	Bom di Masjid Adz-Dzikra, Mapolres Cirebon, pada 15 April.
	Bom di Pesantren Umar bin Khattab NTB, pada 11 Juli.
	Bom di GBIS Kepunton Solo, pada 25 September.

Sumber: Saefudin Zuhri, dalam Deradikalisasi Terorisme.²⁷

Tahun 2020 BNPT melakukan penelitian potensi radikalisme di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa potensi radikalisasi tahun 2020 mengalami penurunan, terjadi feminisasi, dan urbanisasi radikalisasi. Upaya deradikalisasi generasi muda, netizen, dan literasi digital belum berhasil menjadi daya tangkal yang efektif melawan radikalisasi.

Survei ini dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan Alvara Strategi Indonesia, *The Nusa Institute*, Nasaruddin Umar Office, dan Litbang Kementerian Agama. Pada periode antara 2019 dan 2020, terjadi penurunan radikalisme. Indeks potensi radikalisme untuk tahun 2020 mencapai 14,0 (dalam skala 0-100) atau turun 12,2% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 38,4% (dalam skala 0-100). Kabar ini menjadi berita baik, karena program deradikalisasi yang dijalankan BNPT berhasil menurunkan tingkat radikalisme.

Menurut kepala BNPT, terdapat penurunan radikalisme di Indonesia. Indonesia berada di urutan ke-37 di Asia Tenggara, dan peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Filipina. Dalam riset tersebut BNPT menemukan terjadi aksi radikalisme yang dilakukan golongan wanita. Radikalisme wanita lebih tinggi dari pada pria dengan angka 12,3% untuk wanita, dan 12,1% untuk pria, dan dalam konteks masyarakat rural 12,1% dan masyarakat urban mencapai 12,3%.²⁸

Radikalisme di kalangan generasi Z mencapai 12,7%, sedangkan generasi X mencapai 11,7%. Realitas ini tidak terlepas dari fenomena pengguna internet yang aktif mencari konten keagamaan di dunia maya yang berpotensi radikal 12,6%, dibandingkan pengguna internet yang tidak aktif mencari konten keagamaan di dunia maya 10,8%. Penyebaran konten keagamaan mencapai 13,3% dibandingkan pengguna internet yang tidak menyebarkan konten keagamaan 10,8%. Kepala BNPT berpendapat bahwa

²⁷ Zuhri, *Deardikalisasi Terorisme Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*, hlm. 21–22.

²⁸ Fernan Ruhadi, “Survei: Potensi Radikalisme di Indonesia Menurun,” *News, republica.co.id* (blog), Desember 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qlmk6y291/survei-potensi-radikalisme-di-indonesia-menurun>.

keberadaan teroris global ISIS memengaruhi pola pikir pengguna internet, khususnya generasi muda. Mereka menyebarkan pemahaman mereka melalui dunia maya sehingga menciptakan tantangan kemanusiaan baru.²⁹

Jika suatu bangsa yang memiliki beragam agama dan budaya ini berniat untuk mengatasi krisis yang bersifat multi dimensi, maka satu-satunya cara adalah dengan mengakui multikulturalisme disertai dengan dukungan teologi yang sesuai. Ancaman disintegrasi dan konflik horizontal dalam berbagai bentuknya tetap akan membayangi para pemimpin dan masyarakat. Selain itu pemerintah perlu mengkaji kebijakan-kebijakan dalam kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang di dalamnya juga menyangkut hak beragama. Dalam rentang waktu 1998-2020 telah terjadi banyak kekerasan atas nama agama yang melibatkan banyak pihak, bahkan dalam kasus pada pemilihan presiden tahun 2014, pilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dan pilihan presiden pada tahun 2019 telah menguras banyak tenaga dan pikiran.

Untuk tahun-tahun setelahnya yakni sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024 tidak ada satu pun serangan teroris secara terbuka yang terjadi di Indonesia atau *zero terrorist attack*. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa dan fenomena yang menjadi perhatian dunia. Berdasarkan data BNPT, jumlah aksi terorisme di Indonesia terus. Indonesia yang setiap tahun selalu mencatat terjadi serangan teroris dan sebuah negara yang memiliki sel-sel jaringan teroris yang aktif namun mampu mencatat sejarah tidak ada satupun serangan terorisme secara terbuka sepanjang tahun 2024.³⁰

Selain daripada itu bubarnya Laskar Jihad juga menjadi pelajaran yang berharga bagi gerakan *paramiliterisme*, terlebih lagi yang dihubungkan dengan simbol agama. Ormas-ormas berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara luas, serta menyerukan kerjasama tanpa memandang ras, suku, dan agama.³¹

Pluralitas di Indonesia merupakan hasil dari konstruksi sosial yang kompleks, melibatkan berbagai simbol, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Menurut teori konstruksi sosial, identitas plural bukanlah sesuatu yang alami, melainkan dibentuk melalui proses interaksi yang terus-menerus antara kelompok etnis dan agama. Dalam interaksionisme simbolik, pluralitas dipertahankan jika individu dan kelompok mampu memberi makna positif terhadap simbol-simbol perbedaan. Ketika simbol-simbol agama, budaya, dan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ardito Ramadhan, "BNPT Ungkap Tren Radikalisasi Meningkat, Meski Tak Ada Aksi Terorisme" News, *Kompas.com* (blog), 8 April 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/20/20222701/bnpt-ungkap-tren-radikalisasi-meningkat-meski-tak-ada-aksi-terorisme>

³¹ Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, hlm. 66-67.

etnis dipahami sebagai ancaman, maka konflik horizontal menjadi sulit dihindari. Namun, jika makna terhadap perbedaan dibentuk melalui interaksi yang inklusif, maka pluralitas menjadi kekuatan bangsa.

Aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama, seperti yang terjadi pada peristiwa Bom Bali, adalah hasil dari konstruksi sosial terhadap simbol jihad yang dimaknai secara ekstrem. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, individu seperti Imam Samudra memaknai simbol jihad melalui interaksi dengan kelompok radikal dan doktrin yang ekstrem, sehingga tindakan kekerasan dianggap sebagai bagian dari iman.

Sebaliknya, keberhasilan BNPT dalam menekan laju radikalisme menunjukkan keberhasilan dalam mengkonstruksi makna baru terhadap simbol-simbol agama, nasionalisme, dan kemanusiaan melalui edukasi dan kampanye digital. Ini merupakan bentuk konstruksi sosial yang produktif, karena realitas baru diciptakan dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap keberagaman.

Jenis-Jenis dan Pola Penyebaran Radikalisme

Abdurrahman Mas'ud, seorang profesor di bidang Ilmu Sejarah Peradaban Islam dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI periode tahun 2014-2020, menyampaikan bahwa gerakan radikalisme agama dalam beberapa hal bisa mengganggu stabilitas nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa radikalisme agama ini dapat mengganggu NKRI. Pertama, mewarnai atau mengganti ideologi negara yang telah mapan dengan ideologi kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain. Kedua, menyebabkan instabilitas atau keresahan sosial karena sifatnya yang militan, keras, cenderung anarkis, dan tidak mau berkompromi. Ketiga, dampak dari radikalisme dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa.

Menurut Abdurrahman Mas'ud, fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia sebaiknya disikapi sebagai *wake up call* yang menyadarkan seluruh komponen bangsa untuk melakukan konsolidasi diri dengan usaha-usaha sistem kewaspadaan dini, pembinaan umat yang lebih efektif, serta kerjasama kebangsaan yang lebih solid. Pada dasarnya, radikalisme dan berbagai turunannya, terlepas dari simbol agama apapun yang mereka gunakan, merupakan musuh bersama umat beragama. Jika kita telaah lebih dalam, kelompok radikal dan teroris seringkali menempatkan agama sebagai tameng untuk melegitimasi tindakan dan perbuatan mereka.³²

³² Bimas, *Radikalisme Tantangan Keagamaan*, hlm. 1.

Munculnya ideologi radikalisme dan terorisme semakin mencolok dengan adanya kelompok-kelompok radikal yang secara nyata melakukan propaganda melalui berbagai media, seperti contohnya ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*). ISIS yang dipimpin oleh Abu Umar al-Baghdadi dan Abu Ayub al-Misri berkembang dengan sangat pesat dalam waktu yang singkat, sehingga mampu menarik perhatian dunia dan banyak masyarakat yang bergabung bersamanya. Menurut Kallen, fenomena radikalisme memiliki tiga karakter;

Pertama, radikalisme muncul sebagai reaksi berupa evaluasi, penolakan atau perlawanan terhadap keadaan yang sedang berlangsung, baik berupa asumsi, nilai, atau lembaga agama dan Negara.

Kedua, radikalisme selalu berusaha menggantikan tatanan yang ada dengan tatanan lain yang dikonstruksi dan disistemasi melalui pandangan dunia (world view) mereka sendiri.

Ketiga, kekuatan keyakinan dan kebenaran ideologi yang mereka tawarkan, keadaan tersebut rentan menghadirkan nuansa emosional dan seringkali mengarah kepada kekerasan baik psikis maupun fisik.³³

Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap munculnya radikalisme di Indonesia. Faktor internal bersumber dari kalangan umat beragama itu sendiri yang telah banyak menyimpang dari kaidah agama. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan oleh jaringan radikal internasional maupun penetrasi Barat terhadap Islam. Menurut Anas Saidi, radikalisme yang terjadi kini disebabkan oleh Islamisasi yang dilakukan oleh generasi muda terjadi secara tertutup, dan cenderung tidak bersifat terbuka (fleksibel) terhadap pandangan Islam lainnya serta agama-agama di luar Islam.³⁴

Terdapat 2 jenis Radikalisme yakni; Radikalisme Agama dan Radikalisme Politik.

1. Radikalisme Agama

Sejarah kekerasan dan radikalisme dalam setiap agama selalu menyajikan kekerasan dengan dalih nama Tuhan. Konsep ini dapat dipahami karena adanya kekuatan ide "atas nama Tuhan" yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat melampaui klaim otoritas politik yang ada. Dalam tataran praktis radikalisme agama menyerang seluruh individu atau kelompok yang

³³ Robingaton Robingaton, "Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 26, no. 1 (July 15, 2017): hlm. 94, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/684>.

³⁴ Ahmad Asrori, "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas," *KALAM* 9, no. 2 (December 30, 2015): hlm. 260, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.

bertentangan dengan pemikiran mereka, mulai dari mengkafirkan sesama manusia, hingga menyerang individu atau kelompok.³⁵

Selain itu, munculnya radikalisme agama tidak terlepas dari kesalahan pada saat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab suci. Sepanjang perjalanan sejarah Islam terjadi beberapa tindakan radikalisme atas nama agama, pertama gerakan Khawarij yang lahir pada akhir masa Ali bin Abi Thalib. Semangat radikal mereka, tidak ada hukum selain milik Allah dan tidak ada hakim selain Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 44.³⁶

Selain kejadian lahirnya Khawarij, sejarah radikal terulang pada era Khalifah al-Mamun (813-833M), di mana pemaksaan pendapat oleh kelompok Mutazilah terjadi. Individu-individu yang tidak sejalan akan dipenjarakan, disiksa, dan dihukum mati; menariknya, fenomena pemaksaan atas dasar agama tidak pernah surut hingga saat ini, baik di Indonesia maupun di negara lainnya.³⁷

Menurut Dien Wahid, kecenderungan konservatisme tidak hanya muncul dalam gerakan-gerakan Islam kontemporer yang lahir pasca Reformasi akan tetapi juga masuk ke dalam tubuh organisasi yang sudah mapan seperti NU dan Muhammadiyah. Asumsi berubahnya muslim Indonesia menuju konservatif dan cenderung radikal sebut saja kelompok tersebut seperti; MMI (Mejelis Mujahidin Indonesia), JAT (Jama'ah Ansharut Tauhid), JAD (Jama'ah Ansharut Daulah), LJ (Laskar Jihad), dan Jamaah Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI). Meskipun jumlah anggota kelompok tersebut sedikit, namun propaganda mereka memberikan warna yang signifikan bagi potret wajah Islam Indonesia.³⁸

2. Radikalisme Politik

Radikalisme politik merupakan tindakan radikal yang dilakukan perangkat kekuasaan yang ada kepada warga negaranya, atau tindakan radikalisme yang dilakukan satu negara ke negara yang lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau dapat

³⁵ Abd. A'la, "Pembumian Jihad dalam Konteks Indonesia Kekinian: Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan dan Keterbelakangan", (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Volume VIII, Nomor 32, Oktober-Desember 2009, hlm. 55.

³⁶Ibid

³⁷ Junaidi Abdillah, "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat 'Kekerasan' dalam Al-Qur'an," *KALAM* 8, no. 2 (December 31, 2014): hlm. 286–87, <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.224>.

³⁸ Nanang Hasan Susanto, "Menangkal Radikalisme Atas Nama Agama Melalui Pendidikan Islam Substantif," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (June 22, 2018): hlm. 67.

diterjemahkan sebagai hadirnya pihak lain yang berperan dalam fenomena radikalisme yang terjadi.

Membicarakan radikalisme tidak mengucilkan persoalan antara negara dan penguasa. Menurut Hegel, kepuasan tentang negara dan penguasa merupakan elemen utama dalam ilmu politik. Oleh sebab itu, tidak menjadikan "lebai" berbicara radikalisme dalam tatanan politik, umumnya seseorang akan berpikir radikalisme yang dilakukan oleh negara, atau radikalisme yang dilakukan aktor lain selain negara yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Maka dapat dijelaskan bahwa radikalisme tidak hanya dilakukan oleh umat beragama akan tetapi ada pihak yang dapat melakukan tindakan tersebut salah satunya dari negara atau kelompok yang memiliki kekuasaan.³⁹

Radikalisme, baik dalam bentuk agama maupun politik, adalah hasil dari interaksi sosial yang membentuk makna ekstrem terhadap simbol-simbol keagamaan dan negara. Menurut Blumer, makna tidak melekat pada objek itu sendiri, melainkan dibentuk dalam proses interaksi. Kelompok radikal memaknai teks suci, sejarah, dan simbol ideologis dengan cara tertentu, dan menyebarkannya melalui proses interaksi langsung (offline) dan tidak langsung (online). Pola penyebaran radikalisme offline dimulai dari pertukaran identitas dan informasi pribadi, intensifikasi komunikasi, indoktrinasi simbolik, hingga kaderisasi dan pelepasan anggota. Ini mencerminkan proses konstruksi sosial di mana individu mengalami transformasi identitas melalui interaksi yang intens dengan simbol dan aktor dalam kelompok radikal. Pola online menunjukkan bahwa media digital menjadi ruang konstruksi sosial baru. Melalui framing media, simbol-simbol keagamaan dapat dimaknai ulang secara luas dan cepat. Interaksi antara individu dan media menghasilkan skema kognitif baru yang membentuk persepsi tentang realitas agama dan identitas kolektif. Fenomena ini memperkuat teori Blumer bahwa realitas sosial terbentuk dalam interaksi simbolik yang terus berlangsung, bahkan dalam ruang virtual.⁴⁰

1. Pola Offline

Pola offline terjadi jika bertemu secara langsung dan berinteraksi kepada pelaku radikalisme, dalam prosesnya terdapat lima tahap; *Tahap pertama*, sebatas komunikasi dan bertukar informasi identitas pribadi. *Tahap ke dua*, intensifikasi komunikasi, dari saling berkunjung yang mengerucut kepada

³⁹ Ajeng Yolani, Muhammad Rafli Syamsulhadi, Nurul Aini, dan Utama Putra Sejati, *Risalah Tentang Konsep Negara Integralistik, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): hlm. 8.

⁴⁰ Mun'im Sirry, *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal* (Yogyakarta: Suka Press dan Bening Pustaka, 2018), hlm. 109.

aktivitas dan penawaran doktrisasi-doktrisasi yang dibungkus dalam konsep agama atau sosial kemanusiaan. *Tahap ke tiga*, mulai dengan tertariknya seorang kepada kegiatan-kegiatan yang berbau radikal dan ingin mencobanya. Pada tahap ini seorang sudah berkenalan dengan banyak kelompok dan anggota yang lain. Di tahap ini pula terjadi indoktrinasi dengan melegalkan konsep agama dan kemanusiaan. *Tahap keempat* adalah kaderisasi, dengan menjadikan kader militan siap untuk menerima perintah dan arahan. Pada fase pengkaderan, perbedaan antara satu organisasi dan organisasi lainnya disesuaikan dengan tradisi masing-masing. *Tahap kelima*, merupakan tahap pelepasan kader-kader yang telah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas sesuai apa yang diinstruksikan.

Konsep agama yang digunakan oleh kelompok radikal sering tidak menghadirkan fakta penafsiran yang sesuai. Klaim eksklusivisme dalam beragama menjadi pelopor tindakan radikalisme berbau agama, kesalahan dalam pengambilan sumber, dan kurang memahami tradisi agama. Diversifikasi dalam satu tradisi keagamaan merupakan kenyataan. Seringkali perbedaan atau konflik internal agama lebih tajam dari pada antar agama, dan diversifikasi tersebut menunjukkan permasalahan dalam monopoli kebenaran.⁴¹

2. Pola Online

Radikalisme dalam pengiklanannya dipoles sebaik mungkin demi menarik simpatisan, sebagian dari mereka melakukan ceramah agar memikat *audience*. Tidak sedikit masyarakat yang tertarik iklan online radikalisme. Radikalisme berbasis media online merupakan tantangan baru Indonesia pasca 25 tahun reformasi, munculnya kasus perekrutan menggunakan media online menjadi tantangan teknologi. Media online merupakan realitas semu, yang membuat tertarik ialah sifat alamiah masyarakat yang mudah takjub pada tampilan media sosial.⁴² Setidaknya ada empat skema negosiasi antara individu dengan bingkai media.

Pertama, skema tersebut menguat bila media membingkai JAD dengan bingkai yang sama. *Kedua*, bingkai media mengubah individu, skema ini terjadi jika terdapat perbedaan antara individu dan media. Jika tidak ada perbedaan maka skema ini tidak terjadi. *Ketiga*, bingkai media berperan menghubungkan atribut yang awalnya tidak terkait kemudian menjadi terkait. Semisal aksi JAD dengan penegakan Islam. Khayalak yang lain melihat tidak ada hubungan antara JAD dan penegakan Islam tetapi disisi lain terdapat media yang memberitakan aksi JAD sesuai dengan penegakan Islam. *Keempat*,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 110.

⁴² *Ibid*, hlm. 102.

bingkai media berperan dalam menciptakan skema baru pasca kemunculan media yang menghubungkan antara JAD sesuai dengan penegakan Islam masuklah pada tahap akhir dengan diberitakan dan di blow-up secara terus menerus sehingga membentuk fakta dalam masyarakat. Akhirnya kesesuaian ini akan menjadi alasan sebagian masyarakat memasuki organisasi tersebut.⁴³

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan sebuah fenomena kompleks yang mengancam stabilitas bangsa dan kehidupan beragama di Indonesia. Radikalisme tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga menciptakan eksklusivisme dalam beragama yang mengikis nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keberagaman yang telah lama menjadi fondasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran radikalisme semakin meluas, didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah kelompok radikal dalam merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologi mereka. Keberadaan jaringan radikal internasional seperti ISIS, serta berbagai organisasi serupa di tingkat nasional, memperkuat pengaruh mereka di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan minimnya pendidikan agama yang komprehensif juga menjadi pemicu utama seseorang terpapar paham radikal. Krisis kemanusiaan yang bersinggungan dengan krisis nilai-nilai agama menjadi celah subur bagi tumbuhnya gerakan radikal yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan hukum. Dari temuan ini, muncul kesadaran akan pentingnya pendekatan yang integratif dan multidisipliner, dengan melibatkan aspek pendidikan, sosial, ekonomi, serta spiritualitas, untuk mengatasi akar masalah radikalisme secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka disarankan agar seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun masyarakat sipil, bersinergi dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan radikalisme yang lebih komprehensif. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan karakter dan pemahaman agama yang moderat sejak dini, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun melalui kegiatan keagamaan di masyarakat. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi, karena kemiskinan dan ketidakadilan merupakan faktor

⁴³ Eriyanto, *Media dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 86.

yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mempengaruhi masyarakat. Di sisi lain, pengawasan terhadap media digital juga harus ditingkatkan, termasuk melalui regulasi yang bijak namun tetap menjunjung kebebasan berpendapat. Selain itu, penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang menggali pendekatan-pendekatan deradikalisasi yang lebih inovatif dan berbasis pada konteks lokal masing-masing wilayah di Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun daya tahan masyarakat terhadap ideologi menyimpang, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah pluralitas bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi. "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat 'Kekerasan' dalam Al-Qur'an." *KALAM* 8, no. 2 (December 31, 2014): 281–300. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.224>.
- Ali, Muhammad. *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Asrori, Ahmad. "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas." *KALAM* 9, no. 2 (December 30, 2015): 253–68. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- Bakar, Abu. "Argumen Al-Qur'an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme." *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 1 (January 9, 2017): 43–60. <https://doi.org/10.24014/trs.v8i1.2470>.
- Bimas, Ditjen. *Radikalisme Tantangan Keagamaan*. Jakarta: Ditjen Bimas, 2014.
- Efendi, Johan. "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan". 05. Jakarta: LP3ES, 1978.
- Eriyanto. *Media dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hakim, Luqman Al. *Isu-Isu Islam Kontemporer (Politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial)*. Yogyakarta: Idea Press, 2020.
- Kamim, Anggalih Bayu Muh. "Muslim dan Pemanfaatan Teknologi Menuju Pergerakan: Analisis Jaringan Akun Twitter @MCAOps (Muslim Cyber Army) dan Gejala Perubahan Aktivisme Islam." In *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer*, 1st ed. Yogyakarta: CIS Form, 2019.
- Mahfudz, Muhsin. "Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an Terhadap Sikap Keberagamaan" 4, no. 2 (December 14, 2016). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/2768>.
- Makin, Al. *Plurality Religiousity And Patriotism Crictical Insight Into Indonesia and Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2019.
- Nurhadi, Rofiq, Syamsul Hadi, Thoyib I M, and Suhan. "Dialektika Inklusivisme dan Eksklusivisme Islam Kajian Semantik Terhadap Tafsir Al-Quran

- Tentang Hubungan Antaragama | Nurhadi | Jurnal Kawistara” 03, no. 01 (2013).
- Robingatun, Robingatun. “Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan.” *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 26, no. 1 (July 15, 2017).
<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/empirisma/article/view/684>.
- Ruhadi, Fernan. “Survei: Potensi Radikalisme di Indonesia Menurun.” *News.republica.co.id* (blog), Desember 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/qlmk6y291/survei-potensi-radikalisme-di-indonesia-menurun>.
- Samudra, Imam. *Aku Melawan Teroris*. Solo: Jazera, 2004.
- Sirry, Mun'im. *Islam Revisionis Kontestasi Agama Zaman Radikal*. Yogyakarta: Suka Press dan Bening Pustaka, 2018.
- Soeharto. *Agama dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Biru, 1981.
- Sulaiman, Aimie. “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.” *Society* 4, no. 1 (June 1, 2016): 15–22.
<https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.
- Susanto, Nanang Hasan. “Menangkal Radikalisme Atas Nama Agama Melalui Pendidikan Islam Substantif.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (June 22, 2018): 65–88.
- Yakin, Ayang Utriza. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yunus, A. Faiz. “Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam.” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 13, no. 1 (January 1, 2017): 76–94. <https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>.
- Zamakhsari, Ahmad. “Teologi Agama-Agama Tipologi Tripolar; Eksklusivisme, Inklusivisme dan Kajian Pluralisme.” *Tsaqofah* 18, no. 1 (June 28, 2020): 35–51. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v18i1.3180>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Minhaj Berislam, dari Ritual Hingga Intelektual*. Jakarta: INSIST, 2020.
- Zuhri, Saefuddin. *Deardikalisasi Terorisme Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Daulat Press, 2017.